

MEREKONSTRUKSI PERADABAN ISLAM DI INDONESIA DENGAN MEWUJUDKAN KALENDER HIJRIYAH

Nihayatur Rohmah

nihayaturrohmah@yahoo.co.id

Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) NGAWI

ABSTRAK

Kalender merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu peradaban, sehingga dengan demikian kehadiran kalender yang akurat dan konsisten merupakan suatu tuntutan peradaban (civilization imperative). Sejarah perkembangan dunia memperlihatkan bahwa ruang dan waktu menjadi pondasi utama terbangunnya peradaban. Namun demikian peradaban modern utamanya Barat, perkembangannya tak lepas dari teori yang diperkenalkan oleh Anthony Giddens yakni mekanisme disembedding yang diwujudkan dalam pemisahan antara waktu dan ruang. Pemisahan ini menghasilkan waktu global yang dimaknai menjadi token untuk membangun kepercayaan. Dunia Islam yang masih sering terbentur pada dualisme oposisional metode hisab dan rukyat perlu mereposisi keduanya agar dapat membangun sistem waktu global sebagai sebuah instrument untuk pembentukan organisasi social yang juga bersifat global. Kalender hijriyah digagas tidak semata untuk kepentingan administratif bisnis dan politik, namun yang lebih penting adalah guna kepastian waktu ibadah. Ketika kalender dipaksakan menjadi kalender yang berbasis global (waktu berlaku satu dan sama untuk semua lokasi/ruang), maka tentu akan berbenturan dengan kaidah waktu ibadah yang bersifat local kecuali ketika kehadiran kalender hijriyah ini berlaku untuk kepentingan non ibadah. Mengkontekstualisasikan teori Giddens di atas dengan konteks ke Indonesiaan, maka kita memahami arti disembedding atau pemisahan antara ruang dan waktu berskala nasional. Selama ini, yang dianggap sebagai akar permasalahan dalam perbedaan penentuan awal bulan hijriyah terletak pada pemahaman aspek metodologis yakni hisab dan rukyat. Namun, faktanya untuk saat ini tidaklah demikian. Sudah saatnya mengakhiri dikotomi antara Rukyat dan hisab dan kemudian bersama-sama berfikir untuk membangun peradaban Islam yang termanifestasi dalam wujud kalender Islam yang mapan. Merekonstruksi arti disembedding ruang dan waktu dalam konteks Indonesia adalah proses separasi yang menjadikan waktu dan ruang menjadi konfigurasi baru yang tidak lagi terbatas dari lokalitas internal ormas keagamaan, terbatasnya pemahaman antara metodologis hisab atau rukyat sehingga waktu menjadi bersifat nasional dengan konsep Matla' Wilayatul Hukmi.

Kata Kunci: *Peradaban, Kalender Hijriyah*

A. PENDAHULUAN

Kalender merupakan ekspresi dari ritma aktifitas kolektif dan dalam waktu yang sama berfungsi memastikan keteraturannya. Oleh karena itu, berbagai peradaban sejak dari zaman kuno hingga sekarang memberikan perhatian serius untuk menata sistem kalendernya sesuai dengan filosofi, pandangan hidup dan tradisi peradaban tersebut. Kalender merefleksikan daya lenting dan kekuatan suatu peradaban. Sehingga dengan demikian kehadiran kalender yang akurat dan konsisten merupakan suatu tuntutan

peradaban (*civilization imperative*¹) dan sekaligus merupakan syarat bagi suatu peradaban untuk tetap eksis dan berkembang.² Dalam tatanan peradaban dunia Islam, kalender yang saat ini dianggap mapan karena konsistensinya dalam mengimplementasikan kriteria visibilitas hilal (dari Muharram hingga Dzulhijjah) dalam penetapan kalender adalah Turki dan Malaysia.

Menurut hemat penulis, pertanyaan pertama yang harus dijawab sebelum kita mengupayakan secara optimal terwujudnya kalender yang mapan adalah seberapa besar tingkat kebutuhan umat Islam di Indonesia terhadap eksistensi kalender hijriyah dalam upaya membangun peradaban Islam? Jika jawaban dari ummat Islam di Indonesia ini “merasa” butuh sehingga keberadaan kalender ini merupakan sesuatu yang harus ada dan signifikan, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh dan menjadikan kehadiran kalender ini sebagai tuntutan peradaban (*civilization imperative*) yang bersifat mengikat. Hal tersebut akan menjadi berbeda kondisinya jika ternyata umat Islam di Indonesia ini memandang cukup dengan kalender yang telah ada (kalender masehi) dan tidak menganggap signifikan terhadap keberadaan kalender dalam upaya membangun peradaban, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara visi dan misi dari umat Islam itu sendiri. Maka yang perlu dibangun adalah budaya umat Islam itu sendiri dalam mengimplementasikan peran kalender dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, untuk kepentingan administrasi, ekonomi, politik kenegaraan.

B. PEMBAHASAN

a. Arti Peradaban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³ disebutkan dua arti peradaban; 1) kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin: bangsa-bangsa di dunia ini tidak sama

¹ “*civilizational imperative*” (keharusan dan tuntutan peradaban). Oleh karena itu semua peradaban besar pasti memiliki sistem kalender yang merefleksikan nilai-nilai, pandangan hidup, dan filosofi peradaban tersebut. Peradaban Barat modern memiliki sistem kalender Masehi yang kita gunakan sehari-hari sekarang. Bahkan peradaban Sumeria yang muncul 6000 tahun lalu telah memiliki suatu sistem penanggalan yang terstruktur dengan baik. Akan tetapi yang ironis dan memilukan adalah kenyataan bahwa peradaban Islam yang berusia hampir 1,5 milenium hingga hari ini belum memiliki suatu sistem kalender pemersatu yang akurat. Yang ada adalah kalender-kalender lokal: kalender Malaysia, kalender Indonesia (takwim standar Kemenag), kalender Arab Saudi, kalender NU, kalender Muhammadiyah, dan seterusnya yang satu sama lain berbeda-beda. Baca: Syamsul Anwar, 2012, *Peradaban Tanpa Kalender Unifikatif: Inilah Pilihan Kita?*., baca juga, Al-Alwani, “*The Islamic Lunar Calendar as a Civilizational Imperative*,” dalam Ilyas dan Kabeer (ed.), *Unified World Islamic Calendar: Shari’a, Science and Globalization* (Penang, Malaysia: International Islamic Calendar Programme, 2001), hlm. 9.

² Syamsul Anwar, *Unifikasi Kalender Umat Islam sebagai Utang dan tuntutan Peradaban*, (Jogjakarta : UII, 2016), hlm. 3.

³ Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 25

tingkat peradabannya; dan 2) hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa.

Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan *al-hadhârah*⁴ atau *al tamaddun*, *al ‘umrân* atau *tsaqafah*⁵. Sedangkan istilah “peradaban” dalam bahasa Inggris disebut *civilization*. Istilah peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya yang berwujud unsur-unsur budaya yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi.

Seperti yang diungkapkan Arnold Toynbee⁶ peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Pengertian yang lain menyebutkan bahwa peradaban adalah kumpulan seluruh hasil budi daya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik (misalnya bangunan, jalan), maupun non-fisik (nilai-nilai, tatanan, seni budaya, maupun iptek). Huntington⁷ memberi definisi bahwa peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya, yang teridentifikasi melalui unsur-unsur obyektif umum, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subyektif.

Muhammad Kâdzim Makki sebagaimana yang disebutkan oleh Irwan⁸ menyebutkan beberapa elemen dan kriteria peradaban;

1) Khazanah kemanusiaan. Artinya setiap masyarakat manusia mempunyai cara tersendiri dalam memperoleh kenyamanan hidup mereka, dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka dan dalam berinteraksi sosial dan komunikasi, dimulai dari yang sangat primitif sampai dengan yang modern.

2) Akal (pengetahuan) sebagai ciri yang paling menonjol dari peradaban. Akal adalah yang membedakan manusia dari binatang. Dengannya manusia terus mengalami perkembangan yang tiada henti.

⁴ Menurut Ibnu Khaldun, *al hadhârah* adalah sebuah periode dari kehidupan sebuah masyarakat yang menyempurnakan periode primitif (*al badâwah*) dari masyarakat itu, karena *al hadhârah* adalah puncak dari *al badâwah*.

⁵ Rohi Baalbaki, *al-Mawrida Modern Arabic-English Dictionary*, Libanon : Daar Al-Ilm lilmalayin, 1995), hlm. 400.

⁶ Arnold Toynbee “*The Disintegrations of Civilization*” dalam *Theories of Society*, (New York, The Free Press, 1965), hlm. 1355.

⁷ Huntington, Samuel P, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Penj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2004).

⁸ Irwan Cahyadi, 2012, Makalah: *Pengertian Dan Perbedaan Adat, Kebudayaan, dan Peradaban*

3) Eksperimen (*tajribah*) sejarah. Setiap generasi dari sebuah masyarakat mewarisi cara hidup dari generasi sebelumnya dan mencoba mengembangkan warisan itu, karena tidak mungkin satu generasi tiba-tiba menciptakan penemuan tanpa pengetahuan atau pengalaman yang diwarisinya dari generasi sebelumnya..

4) Struktur geografis. Sebuah peradaban pada satu masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis yang meliputinya.

Berdasarkan keterangan Kâdzim Makki, maka setiap masyarakat dan bangsa mempunyai peradaban tersendiri, namun yang satu lebih maju dari yang lain, karena perbedaan elemen-elemen tersebut. Peradaban (*hadharah*) adalah sekumpulan konsep (*mafahim*) tentang kehidupan. Peradaban bisa berupa peradaban spiritual ilahiyah (*diniyah ilahiyyah*) atau peradaban buatan manusia (*wadl'iyah basyariyyah*). Peradaban spiritual ilahiyah lahir dari sebuah aqidah (dasar ideologi), seperti peradaban Islam yang lahir dari Aqidah Islamiyah. Sedangkan peradaban buatan manusia bisa lahir dari sebuah aqidah, seperti peradaban kapitalisme Barat, yang merupakan sekumpulan konsep tentang kehidupan yang muncul dari aqidah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Peradaban buatan manusia bisa pula tidak lahir dari sebuah aqidah, semisal peradaban Shinto, Yunani, Babilonia, dan Mesir Kuno. Peradaban-peradaban tersebut sekedar merupakan sekumpulan konsep yang disepakati oleh satu atau beberapa bangsa. Jadi peradaban ini adalah sebuah peradaban yang bersifat kebangsaan atau buatan manusia.

b. Pergeseran makna “*Disembedding* antara Ruang dan Waktu yang bersifat lokal-Global Internasional ke Lokal-Nasional

Sejarah perkembangan dunia memperlihatkan bahwa ruang dan waktu menjadi pondasi utama terbangunnya peradaban. Namun demikian peradaban modern utamanya Barat, perkembangannya tak lepas dari mekanisme *disembedding* yang diwujudkan dalam pemisahan antara waktu dan ruang. Pemisahan ini menghasilkan waktu global yang dimaknai menjadi *token* untuk membangun kepercayaan. Dunia Islam yang masih sering terbentur pada dualisme oposisional metode hisab dan rukyat perlu mereposisi keduanya agar dapat membangun sistem waktu global sebagai sebuah instrument untuk pembentukan organisasi social yang juga bersifat global.⁹

Diskusi tentang kalender dalam Islam sering dibenturkan pada pilihan metodologis antara menggunakan hisab atau rukyat. Memang dalam banyak kesempatan ada klaim bahwa perbedaan tanggal hari raya sebagai sebuah dampak perbedaan metode

⁹ Ilya Fadjar Maharika, *Ruang dan Waktu sebagai Pondasi Peradaban*”, (Jogjakarta: UII, 2016), hlm. 1

dan dianggap sebagai kewajiban dan bagian dari perayaan keberbedaan dalam Islam. Namun dalam perspektif sebagai umat yang bercita-cita menjadi kekuatan peradaban “alternative” maka perbedaan penetapan kalender tersebut menjadi sebuah persoalan yang sangat mendasar. Sebab, persoalan yang terkait dengan keyakinan yang lebih bersifat individual, maka ada persoalan pragmatis yang menyangkut masyarakat secara luas yaitu ketiadaan kepastian pada waktu global.

Waktu dalam semua peradaban sangat penting sebagai pengatur siklus kehidupan dan oleh karenanya mendapat perhatian tertinggi dan diupayakan keakuratannya. Di peradaban klasik, kalender dikembangkan sebagai perwujudan siklus alam untuk memprediksi waktu tanam, panen, iklim dan lain-lain. Banyak arsitektur dan alat di masa lalu digunakan untuk menandai siklus alami tersebut dan lantas dirayakan dengan ritual-ritual tertentu. Di peradaban klasik tersebut waktu sangat melekat pada ruang (lokasi tertentu). Oleh karena itu “kalender lokal” atau penanda waktu dapat dikembangkan berdasarkan siklus-siklus tersebut. Namun demikian, seiring dengan kesadaran umat manusia pada Bumi yang bundar dan kemudian ekspasinya dengan teknologi informasi maka konsep waktu lokal menjadi berkembang. Peradaban Barat misalnya, mendapatkan momentum untuk mengelola kekayaan yang luar biasa ketika mereka menemukan Amerindia dan menjadikan kesadaran global berkembang untuk pertama kali menggantikan “sistem regional” yang sebelumnya dikenal (Dussel, 1998). Eropa ketika itu dapat menggeser menjadi pusat dunia dengan penemuan kekayaan tersebut dan memaksanya melakukan modernisasi agar sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik. Tak mengherankan, melalui tradisi astronomi dan rakayasa mekanik yang telah dikembangkan oleh Islam klasik, berkembang teknologi jam sebagai penjaga waktu dan sekaligus memunculkan konsep pemisahan antara waktu dan ruang.¹⁰

Dari keseluruhan pernyataan di atas, menurut hemat penulis perlu disadari dan ditaati bersama bahwa berkenaan dengan keberadaan kalender hijriyah yang di dalamnya tidak hanya digunakan sebagai penentu kepastian waktu secara administratif melainkan hal terpenting adalah untuk kepentingan kepastian waktu ibadah. Ketika ide tentang globalisasi kalender itu dicetuskan maka tidak selaras dengan kaidah yang menyatakan bahwa waktu ibadah yang bersifat lokal.

Waktu ibadah dalam Islam sebenarnya bersifat lokal. Waktu shalat dan puasa ditentukan secara lokal berdasarkan fenomena Matahari di tempat tersebut. Ibadah haji pun

¹⁰ Ibid, hlm. 2.

ditentukan secara lokal di Arab Saudi. Belum pernah ada laporan Arab Saudi mengumpulkan informasi dari seluruh dunia sebelum memutuskan hari wukufnya. Kalaupun di Amerika terlihat hilal dan Arab Saudi belum terlihat, yang secara astronomis memungkinkan, belum tentu Arab Saudi mengambilnya sebagai keputusan rukyatul hilal. Padahal orang yang selalu mengikuti keputusan Arab Saudi sering mencari pembenaran dengan alasan mengikuti rukyat global. Dasar hukum rukyat lokal secara umum (termasuk penentuan awal dzulhijjah) adalah hadits Nabi yang memerintahkan berpuasa bila melihat hilal dan berbuka atau beridul fitri bila melihat hilal. Sedangkan penampakan hilal bersifat lokal, tidak bisa secara seragam terlihat di seluruh dunia. Demi keseragaman hukum di suatu wilayah pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian di manapun di wilayah itu berlaku untuk seluruh wilayah (*konsep wilayatul hukmi*).

Tidak perlunya mengikuti kesaksian hilal di wilayah lainnya bisa didasarkan pada tidak adanya dalil yang memerintahkan untuk bertanya pada daerah lain bila hilal tak terlihat. Dalil lainnya adalah ijtihad Ibnu Abbas tentang perbedaan awal Ramadhan di Syam dan Madinah. Tampaknya, Ibnu Abbas berpendapat hadits Nabi itu berlaku di masing-masing wilayah.

Tetapi, sebagian ulama lainnya berpendapat tidak ada batasan tempat kesaksian hilal. Di manapun hilal teramati, itu berlaku bagi seluruh umat di dunia. Dasarnya, karena hadits Nabi sendiri tidak memberi batasan keberlakuan rukyatul hilal itu, jadi mestinya berlaku untuk seluruh dunia. Namun mereka tidak merinci teknis pemberlakuan di seluruh dunia yang sebenarnya tidak sederhana. Untuk mendukung argumntasi ini, ada yang berpendapat rukyat global lebih menjamin keseragaman daripada rukyat local. Tetapi, analisis astronomi membantah pendapat ini. Baik rukyat global maupun rukyat local tidak mungkin menghapuskan perbedaan. Jadi, pendapat untuk mengikuti rukyat global tidak lebih baik daripada rukyat local. Arab Saudi pun tidak melaksanakan rukyat global, mengapa untuk mengikuti Arab Saudi beralih mengikuti rukyat global? Tetapi ada alasan lain untuk mengikuti idul adha seperti Arab Saudi, yaitu alasan idul adha adalah sehari setelah wukuf. Mencermati apa yang telah terjadi di tahun 1999, hal yang perlu dipertimbangkan adalah ketika idul adha 27 Maret bisa disebut “mendahului” bukan “mengikuti” idul adha di Saudi. Dari segi waktu shalat idul adha, pasti mendahului. Saat di sini melaksanakan shalat idul adha pukul 06.30 WIB, di Arab Saudi masih pukul 02.30 dini hari. Dari segi tanggal pun mendahului, di Indonesia saat itu masih 9 dzulhijjah.

Permasalahan berikutnya adalah soal puasa sunnah arafah yang mungkin membingungkan banyak orang. Haramkah muslim di Indonesia puasa pada hari sabtu 27 Maret sedangkan di Arab Saudi sudah beridul Adha? Jawabannya adalah karena waktu ibadah bersifat local semestinya juga mengacu pada waktu di Indonesia. Karena di Indonesia idul adha pada tanggal 28 Maret maka sah puasa pada tanggal 27 Maret. Lain soal bagi orang yang yakin (dengan dasar pertimbangan aqli dan naqli) dengan ijtihad bahwa idul adha jatuh pada 27 Maret, maka bagi mereka terikat pada ketentuan yang diyakinkannya bahwa hari itu haram berpuasa.

c. Implementasi konsep Anthony Gidden

Mengutip apa yang pernah ditulis oleh Ilya Fadjat Maharika tentang konsep yang ditawarkan oleh Anthony Gidden dalam bukunya *The Consequences of Modernity* (1990) mengungkapkan bahwa keberhasilan peradaban Barat salah satunya ditandai dengan proses *Disembedding* atau terjadinya pemisahan antara ruang dan waktu. Dalam bahasa Gidden proses separasi tersebut menjadikan waktu dan ruang menjadi konfigurasi baru yang tidak lagi terbatas dari lokalitas waktu menjadi *token* yang bersifat global. Namun demikian, dalam hal ini penulis mencoba meredefinisikan konsep ruang dan waktu *ala* Anthony Gidden mungkin sedikit berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Ilya Fadjat. Mengawali pemahaman dari local ke global internasional menjadi local ke nasional. Penulis berfikir bahwa kalender hijriyah digagas tidak semata untuk kepentingan administratif bisnis dan politik, namun yang lebih penting adalah guna kepastian waktu ibadah. Ketika kalender dipaksakan menjadi kalender yang berbasis global (waktu berlaku satu dan sama untuk semua lokasi/ruang), maka tentu akan berbenturan dengan kaidah waktu ibadah yang bersifat local kecuali ketika kehadiran kalender hijriyah ini berlaku untuk kepentingan non ibadah.

Token muncul dalam kajian modernitas *Anthony Giddens* sebagai salah satu tipe mekanisme *disembedding* yang secara instrinsik menjadi intisari perkembangan institusi social modern. Gidden memainkannya secara khusus sebagai *symbolic token*. Ia mendefinisikan *token* sebagai *media of interchange* yang dapat dipertukarkan tanpa terikat pada karakter individual atau kelompok social (Giddens 1990: 22).

Mengkontekstualisasikan teori Giddens di atas dengan konteks ke Indonesiaan, maka penulis mencoba memahami arti *disembedding* atau pemisahan antara ruang dan waktu berskala nasional. Di Indonesia, perbedaan tafsir antara hisab dan rukyat dalam rujukan dalil syar'I tidak bisa dipersatukan lagi. Kita menerimanya sebagai kenyataan

perbedaan madzhab dan sebagai khazanah pemikiran yang menunjukkan keluasan ruang ijtihad di kalangan umat Islam. Tetapi dalam prakteknya, ada kecenderungan hisab dan rukyat mulai menyatu. Pengamal rukyat memerlukan hisab, pengamal hisab pun mulai tertarik melakukan rukyat. Identifikasi ormas NU sebagai pengamal rukyat dan Muhammadiyah bersama Persis sebagai pengamal hisab semakin kabur. Banyak generasi muda NU yang pakar hisab astronomi. Sementara banyak juga generasi muda Muhammadiyah dan Persis menggandrungi pengamatan astronomi, termasuk pengamatan hilal (Thomas Djamaluddin, 2016).

Selama ini, yang dianggap sebagai akar permasalahan dalam perbedaan penentuan awal bulan hijriyah terletak pada pemahaman aspek metodologis yakni hisab dan rukyat. Namun, faktanya untuk saat ini tidaklah demikian. Sudah saatnya mengakhiri dikotomi antara Rukyat dan hisab dan kemudian bersama-sama berfikir untuk membangun peradaban Islam yang termanifestasi dalam wujud kalender Islam yang mapan. Merekonstruksi arti *disembedding* ruang dan waktu dalam konteks Indonesia adalah proses separasi yang menjadikan waktu dan ruang menjadi konfigurasi baru yang tidak lagi terbatas dari lokalitas internal ormas keagamaan, terbatasnya pemahaman antara metodologis hisab atau rukyat sehingga waktu menjadi *token* yang bersifat nasional. Dalam bahasa fiqh kemudian dikenal dengan istilah *Matla'* dengan konsep *wilayatul hukmi*.

Di dalam wacana fiqh, terdapat dua (2) teori tentang matla', yakni teori *Ittifaq al-Matali'* yang disusun oleh madzhab Hanafi, Maliki & Hanbali dan *teori Ikhtilaf al-Matali'* yang dibangun oleh madzhab Syafi'i. Menurut teori *Ittifaq al-Matali'*, peristiwa terbit hilal yang dapat dirukyat dari suatu kawasan Bumi tertentu mengikat seluruh kawasan Bumi lainnya di dalam mengawali dan menyudahi puasa. Dasarnya adalah hadits Nabi "*shuumuu liru'yatihi waafthiruu liru'yatihi*". Hadits tersebut ditujukan untuk seluruh umat secara umum, sehingga apabila salah satu dari mereka telah melihat/merukyat hilal dibelahan Bumi manapun ia berada, maka rukyatnya itu berlaku juga bagi mereka seluruhnya. Menurut teori ini, rukyat hilal itu hanya berlaku untuk kawasan rukyat itu sendiri dan untuk semua kawasan lainnya yang terletak di sebelah Baratnya. Sedangkan untuk sebelah Timurnya, rukyat hilal itu hanya berlaku bagi kawasan yang berada di dalam-atau tidak melampaui-batas matla'. Rukyat di suatu kawasan, menurut teori ini, tidak dapat diberlakukan untuk seluruh dunia karena *pertama*, berdasarkan riwayat Kuraib yang ditakhrij oleh Muslim bahwa Ibnu Abbas yang tinggal di Madinah menolak

berpegang pada rukyat penduduk Syam kendati telah di itsbat oleh Khalifah Muawiyah. Ibnu Abbas mengemukakan alasan, *hakadza amarana Rasulullah* (begitulah Rasulullah menyuruh kami). *Kedua*, adanya perbedaan terbit dan terbenam Matahari dipelbagai kawasan di Bumi menyebabkan tidak mungkin seluruh permukaan Bumi disamaratakan sebagai satu matla’.

Karena “ajaran” perbedaan matla’nya inilah teori *ikhtilaf al-Matali’* dengan mudah dipersepsi sebagai biang terjadinya perbedaan hari dalam memulai maupun mengakhiri puasa Ramadhan di berbagai kawasan di Bumi. Bahkan, lebih jauh teori inipun kemudian dituding sebagai pemicu perpecahan umat. Tapi persoalannya, logiskah perintah Nabi “*shuumuu liru’yatihi*..itu dipahami sebagai dalil yang menghendaki berlakunya rukyat secara internasional? Untuk menjawab pertanyaan ini maka akan penulis paparkan hasil analisis dari Abdussalam Nawawi (2007, p. 115) dengan pendekatan yang proporsional. Pertama, kiranya kita sepakat bahwa hadits kandungan di atas adalah petunjuk tentang penentuan waktu memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan. Karena berkenaan dengan waktu, maka pemahaman akan implementasinya haruslah menggunakan logika sistem perjalanan waktu, bukan logika pengertian bahasa. Kedua, sunnatullah tentang sistem perjalanan waktu di Bumi adalah bersifat setempat-setempat (local) tidak bersifat global. Waktu di Bumi mengalir dari timur ke barat sejalan dengan aliran siang dan malam. Kawasan di timur mengalami *syuruq* dan *ghurub* Matahari lebih dulu daripada kawasan di Barat. Semakin jauh jarak barat-timur antar kedua kawasan semakin besar pula beda waktu antara keduanya.

Dengan begitu, semua waktu yang disebut didalam dalil-dalil syariat logisnya adalah dipahami sesuai logika system perjalanan waktu di Bumi yang bersifat setempat-setempat itu. Kalau pada saat *ghurub* Matahari di Indonesia hilal belum bisa dirukyat, adalah tidak logis kalau kita kemudian mengikuti rukyatnya orang Makkah.

Selain *token*, mekanisme *disembedding* juga melalui *expert system* (sistem ahli). Ia adalah sistem atau kelengkapan teknis atau ahli professional yang mengatur area yang luas baik organisasi materi maupun lingkungan social. Dasar dari kedua mekanisme tersebut adalah *trust* (kepercayaan). Artinya tanpa adanya kepercayaan maka mekanisme token maupun sistem ahli akan gagal dalam membentuk modernitas. Dalam pandangan Giddens peradaban Barat modern didasari oleh mekanisme tersebut sehingga kepercayaan menjadi panglima bagi perkembangannya dan terimplementasikan dalam seluruh aspek

kehidupan. Praktisnya dalam upaya terwujudnya kalender yang mapan terdapat pra-syarat agar keberadaannya dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun, yakni:

1. Otoritas yang menjaga
2. Wilayah keberlakuan hukum yang tegas
3. Kriteria yang disepakati

Untuk membentuk kalender Islam yang mapan, kita sudah memiliki otoritas tunggal, yaitu Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama. Mekanisme yang dapat ditempuh diantaranya dengan digelarnya sidang Itsbat yang mewadahi keseluruhan ahli dari berbagai kalangan. Upaya pemerintah melalui sidang itsbat pada dasarnya berpijak pada upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat Islam Indonesia. Pemerintah dengan berdasar pada kaidah *“hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’al-khilaf”* (keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat). Keputusan yang diambil pemerintah, sebagai upaya untuk mengakomodir semua madzhab semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam tataran realitas, ternyata masing-masing pihak mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Sudah saatnya menanggalkan egoisme ormas, egoisme partai dan aliran demi kepentingan persatuan umat.

Batas wilayah secara umum sudah disepakati yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global (namun tanpa memberikan konsepnya). Masalah kriteria makin menampakkan perbedaan antar-ormas Islam, khususnya antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis). Hasil hisab secara umum sama antara hasil hisab Muhammadiyah, NU, dan Persis karena semuanya menggunakan perangkat lunak astronomi. Hasil penetapan hisabnya, awal Ramadhan 1436 semuanya sepakat akan jatuh pada 18 Juni 2015. Hasil penetapan hisab awal Syawal (Idul Fitri) 1436 Muhammadiyah dan NU akan sama (17 Juli 2015), namun Persis berbeda (18 Juli 2015). Hasil penetapan hisab 10 Dzulhijjah (Idul Adha) 1436 Muhammadiyah lebih awal (23 September 2015) daripada NU dan Persis (24 September 2015). Perbedaan tidak berhenti sampai disitu, pada saat konjungsi tanggal 13 September 2015 pada saat Matahari terbenam pukul 18:31 tinggi hilal di Makkah berada pada kisaran $1^{\circ}17'33''$ dan Saudi telah menetapkan wukuf bagi jamaah haji di Makkah pada tanggal 22 September 2015.

Ketika terjadi perbedaan, bagaimana sikap kita? Marilah kita mengingat cita-cita besar umat Islam untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan. Sejalan dengan kaidah “

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة (Kebijaksanaan Imam/Kepala Negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan).

Persoalan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukan sekadar masalah penetapan waktu ibadah. Ada cita-cita besar yang ingin diwujudkan umat Islam: mewujudkan kalender Islam yang mapan. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya.

Di dunia Islam, tokoh pertama yang membahas secara ilmiah konsep peradaban adalah Ibnu Khaldun dalam bukunya “*Muqaddimah*”. Bagi Khaldun, peradaban identic dengan organisasi social yang mengatur masyarakat karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk politik. Itu pula yang menjadi hakikat peradaban yang merupakan dimulai dari dasar manusia sebagai ciptaan Allah sebagai makhluk yang sekedar mencari makanan. dari kebutuhan dasar yang sangat sederhana ini kemudian berkembang menjadi organisasi social yang kompleks yang menjadikan manusia berkembang menjadi berkarakter berperadaban. Namun Khaldun mengingatkan bahwa dalam proses berperadaban tersebut nilai kenabian adalah karakter yang diperlukan dan bukan semata akibat logis dari kehidupan politis (Ilya, 2016: 4) singkat kata, untuk membangun peradaban maka keimanan harus muncul terlebih dahulu, mendahului seluruh proses peradaban yang menjadi tersebut. Disinilah arti penting wacana penyatuan kalender di Indonesia, selain sebagai sebuah upaya membangun kepercayaan (*trust*), organisasi manusia yang meruang-waktu saat ini perlu disikapi dengan kritis sekaligus membangun niat yang kuat untuk membangun karakter manusia (muslim) untuk era peradaban (baru). Hemat penulis, perlu mengkaji ulang makna *Ulil Amri* , redefinisi kemudian sosialisasi terkait peran pemerintah dalam hal kewenangan dalam penetapan awal bulan yang mewujud dalam bentuk kalender. Membutuhkan ikhtiar yang serius bagi pemerintah agar keberadaannya dapat diterima dan layak disebut sebagai *Ulil Amri* untuk siapapun. *Ulil Amri* tidak lagi dipahami secara sempit dalam arti mentaati pimpinan ormas keagamaan dan menafikan eksistensi pemerintah (baca: Qadli, Menteri Agama) yang sejatinya memiliki kewenangan hak itsbat.

d. Peran Agama dalam membangun Peradaban

Banyak cendekiawan merumuskan bahwa agama merupakan unsur pokok dalam suatu peradaban (*civilization*). Agama, kata mereka, adalah faktor terpenting yang menentukan karakteristik suatu peradaban. Sebab itu, Bernard Lewis, menyebut peradaban Barat dengan sebutan “*Christian Civilization*”, dengan unsur utama agama Kristen.

Samuel P. Huntington juga menulis: *“Religion is a central defining characteristic of civilizations.”* Menurut Christopher Dawson, *“The great religions are the foundations of which the great civilizations rest.”* Di antara empat peradaban besar yang masih eksis – Islam, Barat, India, dan Cina, menurut Huntington, terkait dengan agama termasuk didalamnya terdapat Islam, Kristen, Hindu, dan Konghucu.¹¹

Peradaban-peradaban kuno, seperti Mesopotamia dan Mesir Kuno juga menempatkan agama sebagai unsur utama peradaban mereka. Marvin Perry mencatat: *“Religion lay at the center of Mesopotamian life. Every human activity political, military, social, legal, literary, artistic - was generally subordinated to an overriding religious purpose. Religion was the Mesopotamians’ frame of reference for understanding nature, society, and themselves; it dominated and inspired all other cultural expressions and human activities.”*¹²

Dalam tradisi peradaban Mesir Kuno, agama menempati peranan yang sangat penting: *“Religion was omnipresent in Egyptian life and accounted for the outstanding achievements of Egyptian civilization. Religious beliefs were the basis of Egyptian art, medicine, astronomy, literature, and government.”*¹³ Berangkat dari pentingnya peranan agama dalam suatu peradaban, maka dapat dijelaskan, bahwa tanda-tanda kehancuran suatu peradaban dapat dilihat sejauh mana unsur utama (agama) dalam peradaban tersebut tetap terpelihara dengan baik. Jika agama yang menjadi pondasi utama peradaban itu sudah rusak, maka dapat diartikan, peradaban itu telah mengalami satu perubahan yang signifikan. Mungkin peradaban itu tinggal hanya nama. Tetapi, hakikatnya, peradaban tersebut sudah rusak atau sudah hancur.¹⁴

Dalam sejarah manusia, berbagai kehancuran peradaban di muka bumi sudah begitu banyak terjadi. Dan Allah SWT menganjurkan kaum Muslimin agar mengambil pelajaran (hikmah) dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. “Maka berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana hasilnya orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul Allah SWT) (QS. an-Nahl: 36). Sejarah juga mencatat, bagaimana Peradaban Islam di Spanyol yang sangat agung dan sudah bertahan selama 800 tahun (711-1492) dapat

¹¹ Samuel P. Huntington, *Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Touchstone Books, 1996), hlm. 47; Bernard Lewis, *Islam and the West*, (New York: Oxford University Press, 1993).

¹² Marvin Perry, *Western Civilization A Brief History*, (New York: Houghton Mifflin Company, 1997), hlm. 9.

¹³ Ibid, hlm. 15

¹⁴ Adian Husaini, *Masa Depan Indonesia: Kajian Peradaban*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 9, No. 1, Januari 2007), hlm. 66.

dihancurkan dan akhirnya kaum Muslimin dimusnahkan dari bumi Spanyol. S.M. Imamuddin menyebutkan beberapa faktor penyebab kehancuran peradaban Islam di Spanyol. Yang terpenting adalah adanya perpecahan dan kecemburuan antar suku.¹⁵

Penulis menggaris bawahi diantara faktor penyebab kehancuran peradaban yaitu perpecahan. Sejenak kita perhatikan dan amati bahwa kondisi umat Islam di Indonesia yang belakangan mengalami perpecahan dalam hal penentuan awal bulan hijriyah. Ada suatu kerisauan karena ummat Islam belum mempunyai kalender Islam yang mapan. Perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang sering menimbulkan kebingungan ummat bermula dari belum adanya kalender Islam yang mapan. Sangat ironis ketika kita menyadari bahwa umat Islam menempati jumlah terbesar di Indonesia namun keberadaanya terpaksa tidak bisa harmoni dalam perjalanannya.

Yang jelas, jatuh bangunnya suatu peradaban, pada dasarnya tergantung pada kondisi manusia-manusia dalam peradaban itu sendiri.¹⁶ Kekalahan dan kehancuran suatu peradaban adalah disebabkan oleh tindakan mereka sendiri, yang menciptakan “kondisi layak kalah” (*al-qabiliyyah lil-hazimah*). Allah SWT menegaskan: “Yang demikian itu karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS al-Anfal: 53).

Pakar sejarah Arnold Toynbee juga menekankan peran agama dalam suatu peradaban. Toynbee tidak menekankan pada wacana *clash of civilizations*, tetapi lebih menekankan pada aspek ‘peran dinamis agama dan spiritualitas dalam kelahiran dan kehancuran satu peradaban’. Ia menyimpulkan, bahwa banyak peradaban yang hancur (mati) karena ‘bunuh diri’ dan bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Dalam studi yang mendalam tentang kebangkitan dan kehancuran peradaban, Toynbee menemukan, bahwa agama dan spiritualitas memainkan peran sebagai ‘*chrysalis*’ (kepompong), yang merupakan cikal bakal tumbuhnya satu peradaban. Antara kematian dan kebangkitan satu peradaban baru, ada kelompok yang disebut Toynbee sebagai ‘*creative minorities*’ yang dengan spiritual yang mendalam (*deep spiritual*) atau motivasi agama (*religious motivation*) – bekerja keras untuk melahirkan satu peradaban baru dari reruntuhan

¹⁵ Ibid, hlm. 68.

¹⁶ Ada baiknya merenungkan kembali perdebatan tentang “ciri-ciri manusia Indonesia” yang diangkat oleh Mochtar Lubis dalam ceramahnya di TIM, 6 April 1977. Diantara ciri-ciri umum manusia Indonesia, menurut Mochtar Lubis, ialah: munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, masih percaya takhayul, lemah karakter, cenderung boros, suka jalan pintas, dan sebagainya. (Lebih jauh, lihat, Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

peradaban lama. Karena itu aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi suatu peradaban. Peradaban yang telah hilang inti spiritualitasnya, maka ia akan mengalami penurunan (*Civilizations that lost their spiritual core soon fell into decline*).¹⁷

Perpecahan umat Islam di Indonesia terjadi tidak disebabkan oleh adanya benturan dengan kekuatan luar (baca: peradaban agama lain), melainkan karena adanya faktor internal dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Upaya Unifikasi kalender Hijriyah bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya satu peradaban.

Berdasarkan analisis Toynbee, bisa dipertanyakan, dimana posisi Islam dalam upaya kebangkitan ‘peradaban Indonesia’? Berbagai perdebatan seputar hubungan agama dan negara di Indonesia dan diskursus tentang Islam dan sekularisme dalam sejarah perjalanan Indonesia bisa dijadikan bahan untuk melakukan introspeksi perjalanan bangsa ini. Generasi Indonesia berikutnya saat ini berkesempatan mengkaji kembali peran agama dalam kehidupan bangsa, tanpa terjebak pada istilah dan konsep-konsep klasik populer yang berasal dari sejarah peradabanlain seperti istilah ‘sekular’ ‘medieval’, ‘teokratis’, ‘militan’, ‘radikal’ dan jugapolarisasi politik yang ada.

Indonesia perlu melihat secara cermat pada peradaban mana negara ini akan dikaitkan, baik pada masa lalu maupun masa kini dan mendatang? Apakah Indonesia mau mengkaitkan dirinya dengan peradaban Islam, Hindu-Jawa, atau Barat? Indonesia perlu menelaah dengan cermat sejarah dan perjalanan berbagai peradaban dalam meraih kebangkitan. Bagaimana Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan sebagainya, mampu menjelma negara-negara yang disegani saat ini dalam percaturan dunia internasional. Juga, bagaimana muncul dan bertahannya peradaban Islam di Andalusia yang bertahan selama 800 tahun dan Ottoman yang bertahan selama 600 tahun? Selama puluhan tahun dalam perjalanannya, Indonesia masih sibuk untuk mengaitkan dirinya dengan ‘peradaban Majapahit’, yang salah satu manivestasinya adalah kesibukan membangun patung-patung di jalan-jalan raya dengan dana trilyunan rupiah (bayangkan, kalau dana ini digunakan untuk membantu pendidikannasional).¹⁸ Dengan upaya unifikasi kalender hijriyah, ini merupakan kesempatan besar bagi umat Islam di Indonesia untuk

¹⁷ Patricia M. Mische ‘*Toward a Civilization Worthy of the Human Person*’, introduction dalam buku *Toward Global Civilization? The Contribution of Religions*, Peter Lang Publising. Inc., (New York, 2001), hlm. 6.

¹⁸ Adian, hlm. 76.

menunjukkan jati diri nya sebagai umat terbesar di Indonesia dengan membangun peradaban Islam melalui unifikasi kalender hijriyah.

Kajian yang kritis terhadap berbagai peradaban ini sangat penting, agar tidak muncul dua sikap ekstrim: yaitu ‘apriori’ dan ‘latah’. Apriori, artinya menolak secara mentah-mentah unsur positif dari peradaban lain, tanpa memahaminya dengan baik. Misalnya, kaum Muslim perlu realistis, bahwa dalam berbagai aspek, Barat telah mengambil alih dan mengembangkan tongkat estafet peradaban yang pernah dikembangkan Islam selama ratusan tahun. Sepanjang sejarah interaksi antar peradaban, bahkan di masa konflik sekalipun, telah terjadi tukar-menukar khazanah peradaban. Sikap latah artinya kecenderungan menjiplak aspek-aspek peradaban lain yang dianggap mampu memperbaiki kondisi bangsa tanpa mengkajinya secara kritis. Sikap apriori dan dalam beberapa hal mungkin ada unsur ‘*Islamfobia*’ akan berakibat pada terputusnya generasi berikutnya dari khazanah intelektual bangsa, sehingga memunculkan keengganan banyak kalangan untuk menengok kembali khazanah sejarah Islam.¹⁹

C. PENUTUP

Upaya Unifikasi kalender Hijriyah bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya sebuah peradaban. Indonesia perlu melihat secara cermat pada peradaban mana negara ini akan dikaitkan, baik pada masa lalu maupun masa kini dan mendatang? Apakah Indonesia mau mengkaitkan dirinya dengan peradaban Islam, Hindu-Jawa, atau Barat? Indonesia perlu menelaah dengan cermat sejarah dan perjalanan berbagai peradaban dalam meraih kebangkitan. Indonesia khususnya umat Islam di Indonesia harus menentukan sikap, bagaimana tingkat kebutuhan umat Islam itu sendiri terhadap eksistensi kalender Hijriyah yang digadang-gadang akan mampu menjadi “ruh” bangkitnya kembali peradaban Islam. Perlu dibangun sebuah kesepakatan untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Tidak ada lagi ruang khusus dan kecil dalam hal penanggalan hijriyah yang berlaku hanya untuk kalangan dan komunitas (baca: madzhab, kelompok ormas keagamaan, suku) sendiri dan berlaku terbatas, melainkan perlu disepakati adanya satu otoritas yang akan mengatur dalam penentuan penanggalan/ kalender hijriyah yang berlaku untuk kesatuan wilayah hukum NKRI. Pemerintah (baca: *Ulil Amri*) harus

¹⁹ Sebagai contoh, hingga kini, semboyan pendidikan nasional Indonesia adalah “*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*.” Kalimat ini tidak mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi seolah-olah merupakan ‘mantra’. Apakah tidak mungkin semboyan penting dalam pendidikan ini diganti dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami, misalnya: “Menuntut ilmu adalah ibadah”. Daftar upaya penyingkiran Islam dari identitas nasional Indonesia ini bisa semakin panjang. Misalnya, pada usaha penetapan hari-hari besar nasional.

mampu mengayomi dan mengakomodir seluruh kalangan, sehingga secara mendesak segera dibentuk kriteria/formula yang dapat mewadahi semua elemen dengan tetap berpedoman pada kaidah syar'i yang shahih dan sains yang akurat. Peran dan posisi pemerintah (baca: Kementerian Agama) sangat dominan dan vital, mengingat bangunan filosofi yang melatarbelakanginya. Untuk membangun peradaban maka keimanan harus muncul terlebih dahulu, mendahului seluruh proses peradaban yang menjadi tersebut. Disinilah arti penting wacana penyatuan kalender di Indonesia dengan menjadikan pemerintah (*ulil amri*) sebagai elemen penentu yang "wajib" ditaati sebagai konsekuensi orang yang beriman dan berperadaban Islami.

DAFTAR RUJUKAN

- Adian Husaini, *Masa Depan Indonesia: Kajian Peradaban*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 9, No. 1, Januari 2007
- Arnold Toynbee "The Disintegrations of Civilization" dalam *Theories of Society*, (New York, The Free Press, 1965),
- Bernard Lewis, *Islam and the West*, (New York: Oxford University Press, 1993).
- Budiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Huntington, Samuel P, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Penj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2004).
- Ilya Fadjar Maharika, *Ruang dan Waktu sebagai Pondasi Peradaban*", (Jogjakarta: UII, 2016),
- Irwan Cahyadi, 2012, *Pengertian Dan Perbedaan Adat, Kebudayaan, dan Peradaban*
- Marvin Perry, *Western Civilization A Brief History*, (New York: Houghton Mifflin Company, 1997
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Patricia M. Mische 'Toward a Civilization Worthy of the Human Person', introduction dalam buku *Toward Global Civilization? The Contribution of Religions*, Peter Lang Publishing. Inc., New York, 2001,
- Rohi Baalbaki, *al-Mawrida Modern Arabic-English Dictionary*, Libanon: Daar Al-Ilm lilmalayin, 1995)
- Syamsul Anwar, *Unifikasi Kalender Umat Islam sebagai Utang dan tuntutan Peradaban*, (Jogjakarta : UII, 2016